

RINGKASAN

Meningkatnya lingkungan permukiman kumuh di perkotaan telah menimbulkan dampak pada peningkatan suatu permasalahan. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujud permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Kelurahan Sokaanandi merupakan salah satu wilayah yang mengimplementasikan program KOTAKU.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sokaanandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sokaanandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara sudah berjalan dengan baik. Ada empat aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 1) Komunikasi yang terjadi antara pelaksana program dengan penerima program dalam kegiatan program KOTAKU sudah dapat dikatakan baik dan efektif karena sosialisasi tidak hanya dilakukan di awal pertemuan saja, tetapi dilaksanakan setiap bulan Maret dan April. 2) Sumber daya manusia menunjukkan bahwa kualitas yang dimiliki oleh para pelaksana program sudah baik karena telah memenuhi syarat dalam penetapan pendamping. Sedangkan pada sumber daya finansial dana yang diterima untuk pembangunan infrastruktur masih belum bisa menuntaskan semua permasalahan kumuh. 3) Disposisi terkait pelaksana program sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksi di bidangnya masing-masing. 4) Struktur birokrasi dapat dikatakan baik karena terdapat SOP untuk dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan bagi para pelaksana program seperti adanya tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan. Sedangkan aktor pelaksana program yang berasal dari tingkat masyarakat masih kurang mengetahui mengenai adanya pedoman pelaksanaan program KOTAKU yang telah ditetapkan.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Program KOTAKU

SUMMARY

The increase in the slum settlement environment in urban areas has had an impact on increasing a problem. The City Without Slums Program (KOTAKU) is a program to improve access to infrastructure and basic services in urban slums to support the realization of livable, productive and sustainable urban settlements. Sokanandi Village is one of the areas that implement the KOTAKU program.

The purpose of this study is to describe the Implementation of the City Without Slums (KOTAKU) Program in Sokanandi Village, Banjarnegara District, Banjarnegara Regency. The method used in this research is descriptive qualitative research. The informant selection technique used purposive sampling technique. Collecting data using interview, observation, and documentation methods. The analytical method used is interactive analysis method.

The results showed that the implementation of the City Without Slums Program (KOTAKU) in Sokanandi Village, Banjarnegara District, Banjarnegara Regency was running well. There are four aspects that affect the success of implementation; communication, resources, disposition and company's employees. 1) Communication that occurs between program implementers and KOTAKU program's recipients can be said to be good and effective because socialization was not only carried out at the beginning of the meeting, but is held every March and April. 2) Human resources show that the quality possessed by program implementers was good because they meet the requirements in determining mentoring. Meanwhile, the financial resources received for infrastructure development have not been able to solve all the problems. 3) Dispositions related to program implementers are ready to run well in accordance with their respective fields. 4) Bureaucracy structure can be said to be good because there are SOP for program implementation such as preparation, planning, implementation, and sustainability. Meanwhile, the program implementing actors who come from the community level are still not aware of the established guidelines for implementing the KOTAKU program.

Keywords : Implementation, Public Policy, Program KOTAKU